

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu proses kompleks yang mencerminkan perubahan struktur sosial secara keseluruhan, termasuk struktur nasional, sikap sosial, dan lembaga nasional. Indeks keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dapat diukur dari adanya pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan rendahnya ketimpangan pendapatan, tingginya kesempatan kerja bagi penduduk, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan berkurangnya tingkat kemiskinan. Bagi negara berkembang pembangunan ekonomi menjadi fokus utama yang sangat diperhatikan pemerintah. Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang berfokus mengurangi tingkat kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat jangka panjang dan sulit diatasi bahkan dengan perekonomian yang kuat sekalipun, tidak menjamin kemiskinan dapat diatasi sepenuhnya. Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks dan memiliki banyak dimensi. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan dengan pendekatan yang terpadu (M. Nasir, dkk dalam Adit Agus Prasetyo 2010). Menurut Badan Pusat Statistik, penduduk miskin adalah mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Untuk mencapai pemenuhan kebutuhan hidup tersebut, penduduk harus memiliki pendapatan yang cukup. Pendapatan dikatakan

mencukupi jika dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidup secara layak. Untuk mencapai pendapatan yang mencukupi, diperlukan pekerjaan yang hanya dapat dicapai dengan sumber daya manusia yang berkualitas.

Ragnar Nurkse (dalam Kuncoro, 1997:132) menyatakan bahwa kemiskinan di suatu wilayah dapat mengarah pada teori yang disebut lingkaran setan kemiskinan. Terdapat rangkaian atau faktor – faktor tertentu yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain sehingga menciptakan suatu lingkaran setan yang sulit untuk dipecahkan. Faktor – faktor tersebut meliputi keterbelakangan, rendahnya sumber daya manusia, rendahnya modal atau investasi, rendahnya produktivitas, rendahnya pendapatan, dan rendahnya akumulasi modal. Fenomena ini dimulai dengan adanya keterbelakangan di suatu wilayah. Keterbelakangan ini menyebabkan rendahnya tingkat produktivitas, sehingga masyarakat memiliki sumber daya untuk menabung dan berinvestasi. Akibatnya, tingkat akumulasi modal menjadi rendah, yang selanjutnya menyebabkan minimnya kesempatan menciptakan lapangan kerja dan kesulitan keluar dari kemiskinan.

Kualitas hidup manusia dapat dilihat melalui indeks pembangunan manusia. Menurut Badan Pusat Statistik indeks pembangunan manusia dilihat dari tiga dimensi dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Indeks pembangunan manusia berguna dalam membandingkan kinerja pembangunan manusia baik antar negara maupun antar daerah di dalam suatu negara. Indeks pembangunan manusia berfungsi sebagai salah satu indikator untuk mengukur sejauh mana tingkat pembangunan manusia di suatu daerah. Semakin tinggi indeks

pembangunan suatu wilayah, semakin tinggi kualitas hidup penduduknya. Wilayah dengan indeks pembangunan manusia yang tinggi cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan kerja yang berkualitas, sehingga dapat mengurangi kemiskinan. Sebaliknya, jika indeks pembangunan suatu wilayah itu rendah, maka akan mengakibatkan produktivitas tenaga kerja penduduk tersebut rendah yang akan mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diperoleh. Hal tersebut akan meningkatkan jumlah penduduk miskin.

Jika pertumbuhan angkatan kerja terjadi dengan cepat dan lapangan kerja tidak cukup tersedia, maka akan menimbulkan pengangguran di suatu wilayah. Tingkat pengangguran yang tinggi, menandakan kegagalan pembangunan di wilayah tersebut dan menjadi kendala bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat bergantung pada pendapatan yang diperoleh melalui pekerjaan, sehingga apabila masyarakat tidak dapat memperoleh pendapatan yang memadai, akan berdampak negatif pada kesejahteraan dan dapat menyebabkan kemiskinan. Hal ini menjelaskan bahwa pengangguran sangat erat kaitannya dan berdampak terhadap kemiskinan, seperti pendapatan yang rendah, taraf hidup yang tidak memadai, kesehatan yang buruk, dan tingkat pendidikan yang rendah merupakan akibat langsung dari pengangguran karena ketidakmampuan untuk memperoleh pendapatan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari.

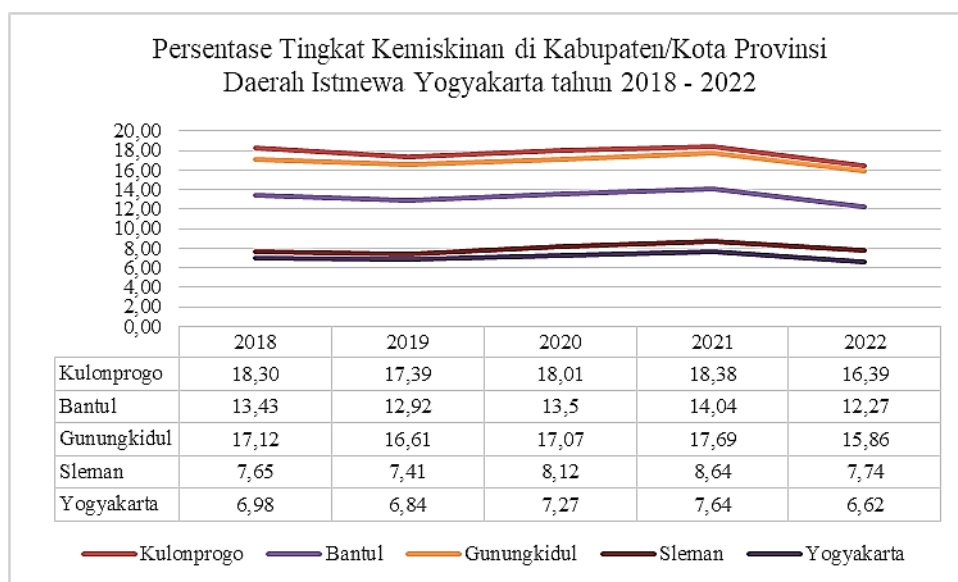
Pertumbuhan ekonomi adalah tolak ukur untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan berkembangnya

kegiatan dalam perekonomian yang megarah pada peningkatan barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut meningkat (Sadono Sukirno: 2010). Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi karena disebabkan oleh faktor produksi yang baik, investasi yang dapat meningkatkan modal, teknologi yang memadai, serta peningkatan jumlah tenaga kerja yang diiringi oleh peningkatan pendidikan dan keterampilan. Ketika perekonomian daerah mengalami peningkatan yang tercermin dalam laju pertumbuhan ekonomi, secara tidak langsung jumlah penduduk miskin akan berkurang dan tingkat kemiskinanpun akan menurun. Pertumbuhan ekonomi yang efektif yaitu ditandai dengan tersebarnya pertumbuhan secara merata dan mencakup semua golongan pendapatan, termasuk penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

Ketimpangan pendapatan mencerminkan perbedaan pendapatan yang signifikan dalam masyarakat. Ketimpangan pendapatan dapat disebabkan karena adanya variasi pola pelaksanaan pembangunan ekonomi. Ketidaksamaan pola tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, beberapa wilayah dapat tumbuh dengan cepat sementara wilayah yang lain tumbuh dengan lambat. Akibatnya, wilayah yang kaya cenderung semakin makmur sementara wilayah miskin akan semakin miskin. Ketimpangan yang terjadi di wilayah dapat menjadi masalah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan pendapatan suatu wilayah yaitu: pembangunan infrastruktur yang hanya difokuskan pada wilayah tertentu, meningkatnya pertumbuhan penduduk, dan tingginya investasi yang digunakan untuk pembangunan yang padat modal. Akibatnya, tingkat pengangguran akan meningkat

dikarenakan pertumbuhan penduduk tanpa diiringi oleh pembukaan lapangan pekerjaan yang seimbang.

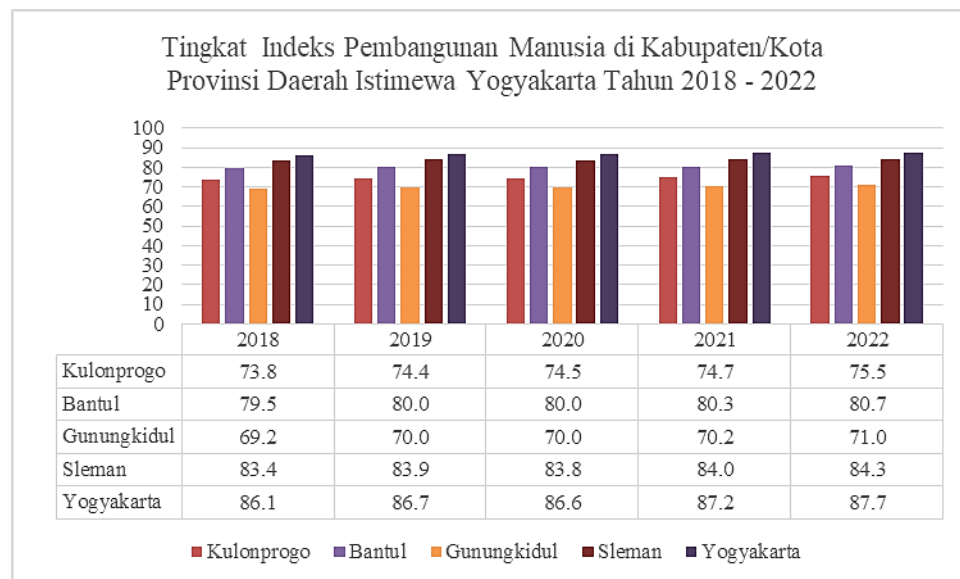
Tingkat kemiskinan di Indonesia masih belum terkendali, banyak penduduk Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Indonesia bervariasi tiap provinsinya, namun mayoritas masih berada di beberapa provinsi di Pulau Jawa. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2018 - 2022, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan paling tinggi di Pulau Jawa. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 5 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta. Di bawah ini merupakan gambar tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Indonesia.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1.1 Persentase Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 – 2022

Berdasarkan gambar 1.1 kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2018 – 2022 mengalami fluktuatif. Terdapat perbedaan yang mencolok antara tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulonprogo merupakan kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini memperlihatkan adanya ketimpangan dalam pembangunan di sisi utara dan sisi selatan, ketika pembangunan sisi utara menciptakan banyak lapangan pekerjaan, sisi selatan yaitu Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulonprogo mengalami ketertinggalan sehingga tingkat kemiskinannya tinggi.

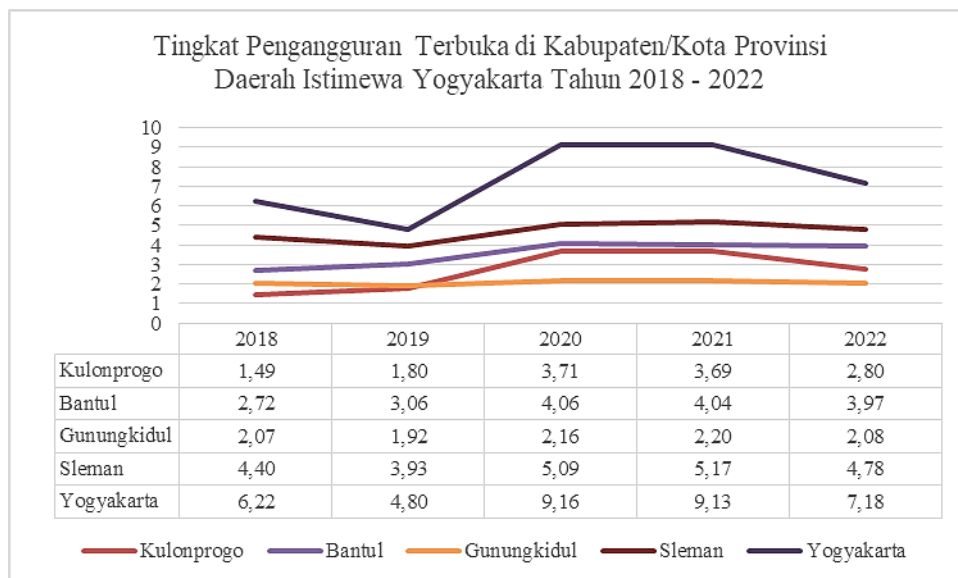


Sumber: Badan Pusat Statistik

**Gambar 1.2 Tingkat Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 – 2022**

Berdasarkan gambar 1.2 indeks pembangunan manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kenaikan tiap tahunnya, tetapi di tahun 2019 ke

2020 mengalami sedikit kenaikan maupun penurunan. Pada tahun 2022 indeks pembangunan manusia yang tertinggi adalah Kota Yogyakarta yaitu sebesar 87,7%. Sedangkan indeks pembangunan manusia terendah adalah Kabupaten Gunungkidul yaitu sebesar 70,1%. Terdapat perbedaan yang mencolok antara indeks pembangunan manusia Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta. Perbedaan ini secara tidak langsung ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam pembangunan ekonomi dan sosial antar wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1.3 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 – 2022

Berdasarkan gambar 1.3 selama 5 tahun terakhir, tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami fluktuatif. Dari tahun 2019 – 2020 mengalami peningkatan dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Tingkat pengangguran terbuka paling tinggi di Provinsi Daerah

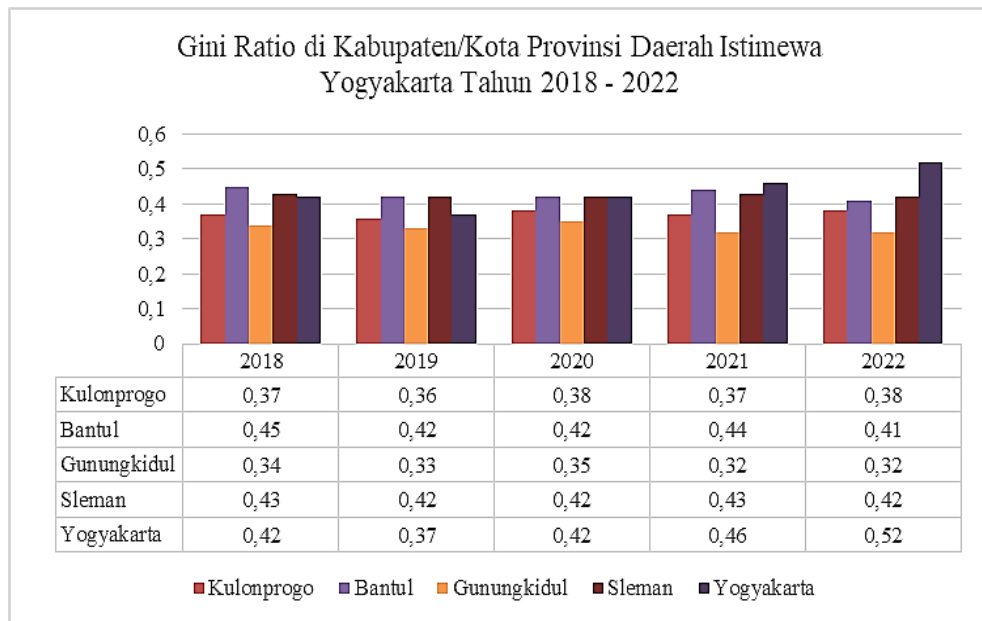
Istimewa Yogyakarta berada di perkotaan yaitu kota Yogyakarta. Sedangkan di perdesaan tingkat pengangguran terbukanya terbilang rendah. Fenomena ini muncul karena perkotaan memiliki lebih banyak sektor formal daripada wilayah perdesaan. Sektor formal lebih sulit diakses oleh angkatan kerja karena mengharuskan kualifikasi atau persyaratan khusus dibandingkan sektor informal.

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 - 2022

Kabupaten/Kota	Tahun (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kulonprogo	10,84	13,49	-3,45	4,37	6,57
Bantul	5,47	5,53	-1,65	4,99	5,20
Gunungkidul	5,16	5,34	-0,68	5,29	5,37
Sleman	6,42	6,79	-3,92	5,55	5,06
Yogyakarta	5,63	6,25	-2,42	5,40	5,83

Sumber: Badan Pusat Statistik (Data diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 dari tahun 2018 – 2019 pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan. Menurun kembali pada tahun 2020, hal ini disebabkan karena adanya penetapan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang menyebabkan banyak sektor harus mengalami penutupan sementara. Karena adanya pembatasan tersebut, dampaknya adalah melambatnya roda perekonomian. Meningkat kembali pada tahun 2021 – 2022, karena adanya peningkatan aktivitas masyarakat yang berjalan seiring dengan menurunnya jumlah kasus Covid-19.



Sumber: Badan Pusat Statistik

**Gambar 1.4 Gini Ratio di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2018 – 2022**

Selama lima tahun terakhir gini ratio kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan dan penurunan. Menurut Badan Pusat Statistik pada bulan Maret tahun 2022, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan ketimpangan tertinggi di Indonesia. Gini ratio menggambarkan tingkat ketimpangan penduduk secara keseluruhan. Rentang nilai gini ratio berada antara 0 sampai 1. Semakin mendekati nilai 1, maka diasumsikan tingkat ketimpangannya semakin tinggi.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan yang paling tinggi di Pulau Jawa. Maka dari itu, penulis berniat untuk melakukan penelitian mengenai faktor – faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh sebab itu penyusun mengambil judul

“ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis, adapun tujuan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan

terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini dapat berguna serta memberikan kontribusi. Adapun manfaat penelitian terbagi atau manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta pengembangan ilmu pengetahuan yang ada. Selain itu, adanya penelitian ini dapat menjadi bahan kajian baru terkait faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta bagi penelitian lain yang ingin memperdalam terkait kajian tersebut. Tidak hanya itu, penelitian tersebut pula dapat menjadi bahan referensi serta acuan bagi Lembaga Pendidikan yang ada khususnya bagi Universitas Pasundan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Lembaga Pendidikan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna dalam memahami faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Bagi Masyarakat Umum

Diharapkan adanya penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan baru, umumnya di bidang ekonomi khususnya di Program Studi Ekonomi Universitas Pasundan.

3. Bagi Mahasiswa/I

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi baru mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta peneliti yang tertarik ingin membahas kajian ini lebih lanjut.

4. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi tantangan serta ilmu pengetahuan baru bagi penulis. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan pemahan baru bagi penulis sehingga dapat berguna bagi Indonesia khususnya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada saat ini ataupun di masa yang akan datang.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi hanya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam periode waktu 2007 – 2022. Tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diasumsikan disebabkan oleh indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Fenomena yang mendasari penelitian ini adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa.